

TOLERANSI BERAGAMA DAN KARAKTER BANGSA: PERSPEKTIF ARKEOLOGI

Hariani Santiko

Departemen Arkeologi FIB Universitas Indonesia

Abstract. The cultural intolerance occurs in our country. Horizontal conflicts involving religion and ethnicity happen frequently at several regions. The cultural values, especially tolerance value, is on the declined or disappeared? Tolerance value, as one of virtue values or even as our nation basic character, is as value transmitted from one generation to next generation. By historical examples and socializing past values through lesson of Pancasila can be internalized effectively values of nation character building.

Key Words: Virtue values, Pancasila, relief of Karmawibhanga, multikulturalism, Bhineka Tunggal Ika

Penelitian karakter bangsa yang menyebut dirinya bangsa Indonesia, memiliki cakupan geografis dikenal sebagai Indonesia tidaklah mudah. Kendala utama disebabkan tingkat kemajemukan masyarakat sangat tinggi dengan aneka ragam budaya mereka. Namun hal ini telah dicoba diatasi oleh pendiri Republik Indonesia seperti tercermin dalam pasal 32 beserta penjelasan Penjelasan UUD 45 tentang Kebudayaan Nasional. Dengan berkembangnya Kebudayaan Nasional menurut Haryati Subadio “secara implisit dapat diartikan bahwa nilai-nilai masing-masing kebudayaan suku bangsa dan keturunan ras di daerah-daerah, akhirnya mesti berkembang menjadi nilai-nilai yang relevan untuk bangsa Indonesia secara menyeluruh” (Subadio, 1993:15-16).

Namun perlu kita kemukakan disini terlebih dahulu apa yang kita sebut sebagai “bangsa Indonesia”. Menurut Edi Sedyawati istilah itu baru muncul pada awal abad 20, setelah adanya gerakan kebangkitan nasional Indonesia dengan “sumpah pemudanya”. Sebelumnya yang ada adalah bangsa-bangsa (sekarang dikenal sebagai “suku bangsa”) dengan kebudayaannya masing-masing, yang satu sama lain seringkali dihubungkan oleh

kepentingan-kepentingan bersama dalam hal ekonomi maupun politik (Sedyawati, 1993-1993:24).

Sesuai dengan pendapat Haryati Subadio tersebut di atas, nilai-nilai masing-masing kebudayaan suku bangsa mesti berkembang menjadi nilai-nilai yang relevan untuk bangsa Indonesia secara menyeluruh. Oleh karena itu, untuk pembentukan karakter (*character building*) bangsa Indonesia, nilai-nilai tersebut antara lain gotong royong, musyawarah, kerukunan, toleransi khususnya toleransi beragama, dan nilai-nilai luhur lainnya, sebaiknya ditanamkan kepada murid-murid SD, SMP, SMA dan tidak ada salahnya kepada para mahasiswa di berbagai Perguruan Tinggi. Salah satu cara memperkenalkan dan menanamkan nilai-nilai bangsa menurut beberapa pendidik dapat melalui pendidikan Pancasila.

Memperhatikan dihapusnya mata pelajaran Pancasila pada Kurikulum Pendidikan Sekolah Menengah maupun Kurikulum Pendidikan Tinggi, sejumlah guru di beberapa daerah merasa kesulitan untuk mencari cara menanamkan nilai-nilai gotong royong, musyawarah, toleransi beragama kepada murid-murid (KOMPAS, 6 Mei

2011). Apa alasan penghapusan mata pelajaran tersebut, tidak akan dibicarakan disini.¹⁾ Namun dapat saya kemukakan bahwa berbagai nilai pembentuk karakter bangsa memang terdapat dalam Pancasila, dasar ideal Negara Republik Indonesia.

Dalam kesempatan ini saya akan membahas salah satu dari nilai-nilai tersebut dengan pendekatan Arkeologi, yaitu toleransi beragama, nilai yang terkait dengan masalah bangsa Indonesia masa kini. Sebelum kita membahas toleransi beragama ini, terlebih dahulu perlu dipahami pengertian ilmu Arkeologi itu sendiri. Arkeologi adalah sebuah disiplin ilmu yang mempelajari kebudayaan dan cara hidup manusia masa lalu, berdasarkan berbagai tinggalan kebudayaan materinya yang sangat terbatas yang kita sebut *artefak*. Bagaimana Arkeologi dapat memahami masa lalu, dapat dimungkinkan melalui metodologi yang dipilih. Salah satu aliran dalam Arkeologi adalah aliran Sejarah Budaya (*Culture History*) yang menggunakan kerangka teoretis normatif (*normative*), yang menganggap kebudayaan adalah wadah dari ide-ide (*shared ideas*), dan kepercayaan (*beliefs*), yang muncul melalui norma-norma dari sekelompok manusia. Hal ini berarti bahwa artefak adalah hasil ide manusia yang terkait dengan benda tersebut (Flannery, 1975:102-107). Berdasarkan asumsi itu, apabila ada 2 artefak yang mempunyai ciri-ciri berbeda, maka kedua artefak itu berasal dari 2 kebudayaan yang berbeda pula (Magetsari, 2005:2).

Pendekatan Arkeologi yang diterapkan dalam karangan ini karena dasar-dasar karakter itu tumbuh dari masa lampau, sebagai nilai budaya yang diturunkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Oleh karenanya ketika kita membicarakan karakter bangsa, sebaiknya kita lakukan dengan menelusuri perspektif kekinian dan perspektif Arkeologi sebagai dasar (Simanjuntak, 2011:1-2). Dalam hal ini kita permasalahan

relevansi masa lampau bagi masa kini, bagaimana hasil penelitian arkeologi dapat berperan dan bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya

Toleransi Agama di Masa Lampau

Dalam karangan ini saya mempergunakan data dari masa Jawa Kuna di Jawa, karena penelitian saya lebih banyak di wilayah tersebut, dan hal ini tidak berarti saya mengabaikan daerah lain. Demikian pula berbagai contoh toleransi beragama hanya akan dipilih beberapa saja, yang diambil dari relief di candi Borobudur dengan data salah satu relief naratif candi, serta sisa candi-candi Siwa di sekitar candi Borobudur. Kemudian multikulturalisme pada masa Majapahit khususnya masa pemerintahan Hayam Wuruk yang dibantu oleh mahapatih Gajahmada, akan mengungkapkan nilai toleransi beragama masa itu.

1. Apa yang Terungkap dari Candi Borobudur

Candi Borobudur didirikan pada abad 9 tarikh Masehi, di atas sebuah bukit di desa Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, merupakan salah satu Warisan Dunia (*World Heritage*) bangsa Indonesia yang telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Dunia (*Cultural World Heritage*) oleh UNESCO tahun 1991. Candi yang bersifat agama Buddha ini, didirikan atas perintah raja dinasti Sailendra pada sekitar abad 9 tarikh Masehi. Para seniman (*śilpin*) Jawa Kuna mempunyai gagasan cemerlang dalam hal memilih lokasi candi, di atas bukit dekat pertemuan 2 buah sungai²⁾, serta memperlihatkan kemahiran mereka pula untuk menggabungkan sesuatu yang bersifat sakral dengan pengalaman estetis sehingga menjadi sebuah karya seni yang mengagumkan. Candi Borobudur berdenah bujur sangkar, berukuran 123x123 meter, tinggi asli (termasuk *chattr*a/payung) 42 meter. Merupakan “bangunan terbuka” maksudnya

tidak mempunyai ruangan suci (*garbhagrha*), terdiri dari 10 tingkatan, 6 tingkatan di bawah berdenah bujur sangkar dengan catatan makin ke atas makin kecil, dan tingkat 7, 8,9 berdenah hampir bulat (sedikit lonjong), diakhiri oleh stupa puncak yang besar. Secara keseluruhan candi Borobudur mempunyai struktur berundak teras dengan tangga di keempat sisinya. Tubuh candi selain dihias oleh stupika (stupa dalam ukuran kecil), patung-patung Buddha, serta dindingnya dihias dengan relief naratif yang terkait dengan ajaran sang Buddha, diambil dari naskah-naskah keagamaan mereka.³⁾ Relief tersebut hanya sampai dengan tingkat 5 (galeri 4), yaitu pada tingkatan candi yang berdenah bujur sangkar. Sementara itu pada tingkatan yang berbentuk hampir bulat (tingkat 7, 8, 9) hanya berhiaskan stupika-stupika berongga dengan arca Buddha di dalamnya. Bagian luar stupa besarnya pun tidak berhias.

Salah satu cerita yang terpahat pada dinding kaki candi adalah cerita Karmawibhangga, yang dipahat pada 160 panil, dan ditemukan kembali tahun 1885 oleh J.W Ijzerman. Sayangnya panil-panil ini ditutup, tetapi keseluruhan panil telah difoto oleh Kasian Cephas tahun 1890-1891.⁴⁾ Karmawibhanga, “karma” berarti “perbuatan” dan “wibhangga” berarti “alur, gelombang”. Karmawibhangga adalah paparan tentang alur atau gelombang kehidupan manusia sebagai akibat perilaku kehidupannya yang lalu. Setiap perbuatan manusia akan berakibat pada bentuk kelahirannya setelah pelaku tersebut meninggal. Bisa dilahirkan kembali sebagai manusia yang cantik atau buruk rupa, yang kaya atau miskin, bodoh atau pandai, lahir sebagai binatang, sebagai hantu kelaparan, lahir di neraka, di sorga dan sebagainya. Jadi baik buruknya nasib ditentukan oleh perbuatan (*karma*) manusia sendiri. Hukum Karma atau Hukum Sebab Akibat berlaku untuk semua orang, baik raja, pejabat,

pendeta, maupun orang kebanyakan. Hal-hal tersebut dipaparkan pada adegan-adegan 160 panil Karmawibhangga tersebut. Menarik perhatian adalah, adegan tersebut menggambarkan kehidupan masyarakat Jawa Kuna (bukan India),⁵⁾ serta berbagai tokoh agama yang memberi wejangan, melakukan tapa dan sebagainya, tidak semuanya tokoh pendeta Buddha (bhiksu), tetapi pendeta non-Buddha (pendeta Siwa), bahkan para pertapa (resi) dengan jumlah tidak sedikit.⁶⁾ Bahwa apa yang digambarkan adalah kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa Kuna, maka dengan sendirinya apa yang tergambar adalah hal-hal yang sesuai dengan cara hidup mereka. Terlihat mereka sangat menghormati pendeta-pendeta lain disamping bhiksu, dan ternyata jumlah bhiksu pada adegan-adegan-adegan tersebut hanya setengah jumlah pendeta-pendeta Siwa dan pertapa. Candi Borobudur adalah candi yang bersifat agama Buddha Mahayana, tetapi para senimannya (*silpin*) tanpa ragu-ragu menggambarkan pendeta selain bhiksu pada adegan-adegan-nya, bahkan dalam jumlah yang lebih sedikit dari jumlah pendeta-pendeta Siwa dan pertapa (Santiko, 2009:127-135; dan 2012:10-13).

Di samping adegan yang terpahat pada candi Borobudur, toleransi keagamaan juga dibuktikan oleh sisa-sisa temuan candi di sekitar candi Borobudur. Pada tahun 1973 dan 1975 saya melakukan survei dalam radius 10 km (tahun 1973) dan radius 5 km (tahun 1975), di sekitar candi Borobudur. Hasilnya mencengangkan, karena terdapat banyak sisa-sisa candi Siwa yang ada di sekitar candi Borobudur. Candi-candi Saiwa (ada sekitar 30 situs dalam radius 5 km) pada umumnya berukuran kecil, terbuat dari bata yang kuat, dahulunya didirikan di sekitar candi Borobudur dan 2 candi Buddha lainnya yaitu candi Mendut dan Pawon (Santiko dkk, 1975).

Berdasarkan kedua data tersebut (relief dan sisa-sisa bangunan candi) mem-

buktikan bagaimana “besar toleransi beragama” raja-raja Śailendra. Walaupun raja beragama Buddha Mahāyana, ia membiarkan rakyat dan bawahannya memeluk agama sesuai dengan pilihan mereka.

2. Multikulturalisme dan kerajaan Majapahit

Majapahit adalah kerajaan agromaritim yang diperkirakan berpusat di Trawulan masa kini. Didirikan sekitar tahun 1293 Masehi oleh Raden Wijaya bergelar Kertarājasa. Majapahit mengalami puncak kebesaran ketika dipimpin oleh raja Hayam Wuruk bergelar Rājasanagara (1350-1389 Masehi). Dengan bantuan mahapatih Gajah Mada, raja Hayam Wuruk berhasil membawa kerajaan Majapahit ke puncak kebesarannya. Seperti halnya raja Kertanāgara, raja kerajaan Singasari terakhir, yang mempunyai gagasan politik perluasan *cakrawala mandala* yang meliputi seluruh *dwipāntara* atau *Nusāntara*, Gajah Mada melontarkan gagasan politik Nusantaranya di hadapan raja Tribhuwanatūṅgadewī, ibu Hayam Wuruk, dan pembesar lainnya sebagai sumpah yang dikenal sebagai *sumpah palapa*. Dalam melaksanakan politik Nusantaranya itu, Gajah Mada menundukkan dan mempersatukan daerah-daerah yang belum bernaung di bawah kekuasaan Majapahit. “Proyek Nasional” Gajah Mada ini memungkinkan makin berkembangnya perdagangan antar pulau yang melibatkan pedagang dari berbagai wilayah, bahkan perdagangan internasional dengan kerajaan-kerajaan Asia. Perkembangan ini menciptakan kondisi multikultural di Majapahit yang menjadi situs pertemuan dan percampuran berbagai unsur budaya “pendatang” dan unsur budaya “lokal”.

Kondisi multikultural ini terjalin dengan proses-proses politik dan ekonomi yang terjadi di Majapahit. Sejalan dengan “proyek” Gajah Mada untuk memperluas dan menyatukan wilayah Majapahit, kelompok

penguasa terus membangun dan mempertahankan kekuasaan sekaligus mengelola keragaman sosial-budaya dan agama yang ada. Kebijakan - kebijakan yang mereka terapkan untuk keperluan ini merupakan jalinan dari kebijakan-kebijakan yang berdimensi politik dan budaya sekaligus. Sesuai dengan teori hegemoni yang diajukan oleh Antonio Gramsci, hegemoni terjadi bukan hanya karena kekuatan politik dan ekonomi kelompok dominan (penguasa), tetapi juga karena kekuatan budaya mereka (Gramsci, 1978; Bellamy, 1990). Mereka muncul dan bertahan menjadi penguasa karena sistem nilai mereka bisa meresap dalam alam pikiran masyarakat, dan diterima sebagai panutan hidup. Walaupun begitu dalam hegemoni, kelompok penguasa harus bekerja terus menerus untuk tetap memiliki dukungan kelompok-kelompok tersebut serta membangun legitimasi posisi mereka.

Di samping kekuatan militer yang dijalankan Gajah Mada untuk menjaga hegemoni Majapahit, Hayam Wuruk menjalankan kebijakan-kebijakan lainnya di bidang ekonomi, sosial-budaya dan agama. Perdagangan antar-pulau dan internasional membawa dampak kedatangan orang asing untuk singgah, atau menetap di Majapahit. Menurut kakawin Nāgarakertagama pupuh LXXXIII:4, di Majapahit terdapat orang-orang dari Jambhudwipa (India), Kambhuja, Cina, Yawana, Champa, Goda (Bengal ?), Syamka dan lain-lain (Pigeaud I, 1960:98). Walaupun belum bisa dikategorikan sebagai “poli bangsa atau poli etnis”, di suatu negara atau kerajaan karena jumlah yang tidak banyak, namun orang asing ini telah menjadi perhatian Hayam Wuruk. Untuk mereka telah diangkat seorang pejabat khusus yaitu *Juru Kling*, yang bertugas menangani keperluan mereka.

Salah satu kebijakan raja - raja Majapahit khususnya Hayam Wuruk adalah penanganannya *multi-agama* di wilayahnya. Secara implisit dalam sumber tertulis

(prasasti dan naskah), disebut tujuan kebijakan di bidang agama ini adalah:

- 1) Saling menghargai antar agama
- 2) Mencegah konflik sosial-agama yang dapat ditimbulkan apabila penanganannya tidak tepat, jadi diperlukan suatu manajemen konflik.
- 3) Menunjukkan sifat toleransi yang menghargai perbedaan (Budianta, 2002).

Hal-hal yang mereka lakukan antara lain:

1. Di Majapahit terdapat multi-agama, dan yang terbanyak penganutnya adalah agama Siwa dari aliran Siwa Siddhanta dan agama Buddha Mahayana. Walaupun raja-raja Majapahit, kecuali ratu Tribhuwanatunggadewi, beragama Siwa, namun mereka mengangkat pejabat-pejabat tinggi baik dari agama Siwa maupun dari agama Buddha bersama-sama. Pejabat tinggi yang menangani hukum dan kehidupan beragama ada 2 yaitu *Dharmādhyaksa ring Kasaiwan* (agama Siwa) dan *Dharmādhyaksa ring Kasogatan* (agama Buddha). Di samping kedua pejabat tinggi tersebut, masih ada 5-7 pejabat pelaksana di bidang hukum dan agama yang disebut Sang Upapatti. Jumlah anggotanya pada awalnya hanya 5 orang beragama Siwa, namun ketika ratu Tribhuanā yang beragama Buddha Mahāyana naik tahta, anggota ditambah 2 orang yang beragama Buddha, sehingga semua berjumlah 7 orang, disebut "Sang Upapatti Saptadulur".
2. Di samping pejabat-pejabat tinggi yang beranggotakan orang-orang yang memeluk agama Siwa dan agama Buddha, menurut kakawin Nāgarakertagama, di Majapahit terdapat 4 agamawan (*caturdwija*) yaitu *rsi-saiwa-sogata-mahābrahmana*, yang akan ikut melaksanakan ritual keagamaan. Resi (*rsi*) adalah pertapa, Saiwa adalah pendeta Siwa, Sogata pendeta Buddha dan Mahābrahmana adalah pendeta Hindu

yang berasal dari luar Indonesia, antara lain dari India. Kadangkala mahābrahmana tidak disebut, dan jumlah hanya 3 agamawan disebut *tripaksa*, yaitu *rsi-saiwa-sogata*.

3. Diatur pula wilayah penyebaran agama: daerah sebelah timur Majapahit untuk para bhiksu menyebarkan agamanya, sedangkan para bhiksu tidak boleh menyebarkan agama di sebelah barat, karena daerah itu diperuntukkan pendeta Siwa. Pengaturan ruang gerak itu disertai himbauan agar para pendeta baik Saiwa maupun Buddha tidak lupa mengutamakan kepentingan negara dan tidak asyik dengan kepentingan sendiri (Pigeaud I, 1960:12-13).
4. Mengatur tempat upacara bersaji/ melakukan ritual keagamaan di kompleks istana, dimana raja beserta keluarganya (beserta para pejabat?) datang bersama-sama secara teratur. Di tempat tersebut terdapat tempat upacara untuk agama Siwa, Buddha dan tempat upacara bersaji lainnya (Nagara kertagama pupuh VIII:4) (Santiko, 2007).
5. Ketika Hayam Wuruk berkuasa, bermunculan pusat-pusat pendidikan agama yang dikelola oleh para rsi. Tempat tersebut dikenal sebagai *Mandala* atau *Kadewaguruan*, letaknya kebanyakan di lereng-lereng gunung terutama di lereng gunung Penanggungan, lereng gunung Arjuna, Welirang, Wilis, Lawu, dan tempat-tempat yang terpencil lainnya jauh dari pusat kota (Santiko, 1986). Hayam Wuruk memberi perhatian besar pada tempat-tempat pendidikan ini, dan dalam perjalanannya di wilayahnya setiap tahun disempatkan datang ke berbagai *mandala/kadewaguruan* untuk berdiskusi dengan para rsi (Santiko, 2009).

Selanjutnya untuk mempertahankan hegemoni Majapahit, raja Hayam Wuruk

setiap tahun melakukan perjalanan ke daerah-daerah wilayahnya. Rute perjalanan selalu berubah setiap tahun, sehingga raja mengenal betul kehidupan masyarakat yang tinggal di wilayahnya.⁷⁾ Selain melihat dari dekat kehidupan rakyatnya, Hayam Wuruk berusaha menarik hati rakyatnya dengan cara berdialog, menyanyi, baca puisi, berburu bersama, dan lain sebagainya. Tindakan semacam ini dilakukan pula di Ibukota Majapahit setiap tahun. Selain itu usaha kelompok dominan untuk memahami berbagai perbedaan budaya dan menghindarkan fanatisme masyarakat.

Di samping itu, Hayam Wuruk melakukan usaha lain di sektor pertanian, antara lain dengan membuat tanggul-tanggul sungai untuk pertanian juga untuk menanggulangi bencana banjir.⁸⁾

Penutup

Secara sadar atau tidak sadar, ajaran leluhur mengenai toleransi beragama sebenarnya sudah terpampang pada lambang Negara Republik Indonesia yaitu pada Burung Garuda. Pada pita yang dicengkeram burung garuda, terdapat kalimat berbunyi “Bhineka Tunggal Ika”. Kalimat tersebut sebenarnya belum selesai, karena ada lanjutannya sebagai berikut: *Bhineka Tunggal Ika Tan Hana Dharmma Mangrwa*. Kalimat ini yang berarti “Terbelah tetapi tunggal, tidak ada Dharmma (ajaran agama) yang mendua”, dikemukakan oleh Mpu Tantular dalam kitab karangannya sebuah *kakawin* berjudul *Sutasoma*, yang disusun pada akhir pemerintahan raja Hayam Wuruk.⁹⁾ Kalimat tersebut diungkapkan oleh Mpu Tantular terkait dengan keadaan keagamaan pada waktu itu, yaitu adanya pembauran konsep Dewa Tertinggi (Kenyataan Tertinggi/ *Highest Reality*) yang sebenarnya tunggal tetapi disebut dengan berbagai nama. Ia disebut Bhattara Buddha oleh pemeluk agama Buddha, sebagai Paramasiwa oleh pemeluk agama Siwa, bahkan oleh pemeluk

agama lain, misalnya pemeluk agama Waisnawa menyebutnya Wisnu dan lain sebagainya. Dengan kalimat tersebut, Mpu Tantular mengemukakan, bahwa sebagai Kenyataan Tertinggi, baik Siwa maupun Buddha tidaklah berbeda, karena keduanya adalah tujuan agama. Pembauran konsep Siwa-Buddha ini secara eksplisit telah terjadi pada masa Singasari, terutama masa pemerintahan raja Kertanāgara. Walaupun ia beragama Buddha Tantrāyana, tetapi ia membangun candi yang bersifat Siwa-Buddha yaitu candi Jawi dan candi Singasari, dengan tujuan “agar pemeluk kedua agama tersebut selalu melakukan ritual bersama” (Nagarakertagama, pupuh LVI:1c).

Pada paparan di atas, saya kemukakan salah satu nilai budaya bangsa kita yang dapat kita gali dari sejarah kerajaan-kerajaan di Jawa, dan sudah tentu ada di wilayah lain yang tidak dapat saya kemukakan semua dalam karangan ini. Di samping toleransi beragama yang digali dari berbagai periode, kebijakan multikulturalisme pada masa Majapahit selain mengungkapkan toleransi keagamaan, membantu kita untuk lebih kritis dalam memahami perbedaan, tidak kaku, tidak canggung, lebih terbuka, dan menciptakan manusia Indonesia yang tidak fanatik.

Bagi Indonesia yang memiliki keragaman budaya, menanamkan nilai-nilai budaya pembentuk dasar karakter bangsa tidaklah mudah. Dengan contoh-contoh kesejarahan, serta mensosialisasikan berbagai nilai masa lampau tersebut antara lain melalui pelajaran Pancasila, secara efektif dapat menanamkan nilai-nilai pembentuk karakter bangsa pada anak didik.

Catatan:

- 1) Pembicaraan tentang dihapusnya mata pelajaran Pancasila tetap berlanjut pada Harian KOMPAS tanggal 7, 9, 11 Mei dan mungkin masih akan terus berlanjut,

mengingat penghapusan mata pelajaran tersebut dianggap sementara ahli sangat merugikan bagi dunia pendidikan. Pancasila yang mengandung seperangkat nilai-nilai pembentuk karakter bangsa Indonesia, nilai-nilai yang digali dan disepakati bersama oleh bangsa Indonesia.

- 2) Pemilihan lokasi untuk bangunan suci di antara 2 sungai sangatlah tepat, karena pertemuan 2 sungai dianggap daerah yang memiliki potensi kuat.
- 3) Candi diberi hiasan relief tidak hanya bertujuan memperindah bangunan, tetapi dapat menambah kekuatan dan kesucian bangunan tersebut. Pemilihan jenis relief disesuaikan dengan fungsi candi, candi-candi Buddha biasanya dihias dengan relief-relief terkait dengan ajaran dan atau mitos-mitos agama Buddha, demikian pula candi-candi Hindu dihias dengan relief cerita-cerita Hindu, mitos-mitos dan sebagainya disesuaikan dengan fungsi candi.
- 4) Kasihan Cephas adalah photographer berkebangsaan Jawa yang sangat handal di jamannya. Banyak membuat foto-foto candi dan tinggalan arkeologi lainnya.
- 5) Pada relief-relief Karmawibhangga banyak adegan-adegan yang masih kita kenali, misalnya pasar, orang memikul sesuatu, jenis-jenis pohon antara lain pohon pisang, sawah-sawah dengan tikus yang menggerogoti padi dan sebagainya.
- 6) Pada agama Buddha juga mengenal pertapa disebut Sramana, tetapi mempunyai ciri-ciri yang berbeda (pakaian, apa yang dipegang dan sebagainya).
- 7) Mpu Prapanca penulis kakawin Nagarakertagama adalah seorang pejabat agama Buddha, dan ia mengikuti berbagai lawatan raja Hayam Wuruk ke daerah-daerah, sehingga ia tahu apa yang dilakukan oleh raja dalam perjalanannya tersebut.
- 8) Uraian sektor pertanian dan pembuatan tanggul-tanggul di jumpai dalam sumber tertulis berupa prasasti
- 9) Ada yang berpendapat, Mpu Tantular hidup setelah raja Hayam Wuruk wafat, dan dilindungi oleh puteri Hayam Wuruk yaitu Kusumawarddhani dan suaminya raja Wikramawarddhana.

DAFTAR RUJUKAN

- Bellamy, R. 1990. *Teori Sosial Modern: Perspektif Itali*. Jakarta: LP3ES.
- Budianta, M. 2002. "Ancaman tidak datang dari luar, tapi datang dari diri sendiri", dalam *INCIS BULLETIN*, edisi 2 volume 1.
- Flannery, K.V. 1975. "Culture History V Culture Process", dalam Mark P. Leone (ed) *Contemporary Archaeology*, London & Amsterdam: Southern Illinois Univ. Press.
- Magetsari, N. 2005. "Perkembangan Teori Arkeologi Mutakhir", makalah pada *Pertemuan Ilmiah Arkeologi*, 2005.
- Pigeaud, Th.G.Th. 1960-1962. *Java in the Fourteenth Century. A Study in Cultural History, The Nagarakertagama by Rakawi Prapanca of Majapahit 1305 AD*. 5 Vols. The Hague: Martinus Nijhoff.
- Santiko, H. 1986. "Mandala (Kadewaguruan) pada Masa Majapahit", paper pada *Pertemuan Ilmiah Arkeologi*.
- Santiko, H. 2007. "Hegemony and Multiculturalism in Majapahit", paper submitted to *the Conference on State Formation and the Early State in South and Southeast Asia Reconsidered*, Singapore.
- Santiko, H. 2009. "The Religious Atmosphere of the Karmawibhanga Reliefs of Borobudur", In: *Uncovering the Meaning of the Hidden Base of Candi Borobudur*, The National Research and Development Centre of Archaeology.
- Santiko, H. 2012, "Relief Karmawibhangga di Candi Borobudur: Identifikasi Adegan dan Ajaran Hukum Karma", dalam *Adegan dan Ajaran Hukum Karma pada Relief Karmawibhangga*, Balai Konservasi Borobudur.
- Sedyawati, E. 1992. "Arkeologi dan Jatidiri Bangsa", makalah pada *Pertemuan Ilmiah Arkeologi*, 1992.

Simanjuntak, H.T. 2011. "Arkeologi dan Pembangunan Karakter Bangsa", paper pada *Pertemuan Ilmiah Arkeologi ke-12* di Surabaya.

Subadio, H. 1986. "Kepribadian Budaya Bangsa" dalam *Kepribadian Budaya Bangsa (Local Genius)*. (Ayatrohaedi, ed). Jakarta: Pustaka Jaya.